



REVISI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

PENGADILAN NEGERI PEKALONGAN KELAS IB



PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA



REVISI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel yang berorientasi kepada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SARWONO , S.H., M.Hum.

Jabatan : Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan Kelas IB

Selanjutnya disebut ***Pihak Pertama***

Nama : Dr. NOMMY HT. SIAHAAN, S.H., M.H.

Jabatan : Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut ***Pihak Kedua***

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pekalongan, Januari 2018

PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA,



Dr. NOMMY HT. SIAHAAN, S.H., M.H.
Hakim Utama

SARWONO, S.H., M.Hum.
Hakim Madya Utama

REVISI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

UNIT KERJA : PENGADILAN NEGERI PEKALONGAN KELAS IB

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan : - Perdata - Pidana	100% 100%
		b. Persentase Perkara : - Perdata - Pidana yang diselesaikan tepat waktu	90% 90%
		c. Persentase Penurunan sisa perkara : - Perdata - Pidana	10% 10%
		d. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum : • Banding • Kasasi • PK	95% 97% 99%
		e. Persentase Perkara Pidana Anak Yang Diselesaikan dengan Diversi	2%
		f. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	80
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase Isi Putusan yang diterima Oleh para pihak Tepat Waktu	100%
		b. Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi	2%
		c. Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu.	80%
		d. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus	tidak ada perkara tipikor
3	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	100%
		b. Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan	100%
		c. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100%
4.	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi)	1%

Kegiatan	Anggaran
1. Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	Rp. 5.870.593.000,-
2. Pengadaan Sarana dan Prasarana Di Lingkungan Mahkamah Agung RI	Rp. 381.250.000,-
3. Peningkatan Manajemen Peradilan	Rp. 71.340.000,-

Ketua Pengadilan Tinggi
Jawa Tengah

Dr. NOMMY HT. SIAHAAN, S.H., M.H.
Hakim Utama

Pekalongan, Januari 2018

Ketua Pengadilan Negeri
Pekalongan Kelas IB



SARWONO, S.H., M.Hum.
Hakim Madya Utama

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA



REVISI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel yang berorientasi kepada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : PUJIONO, S.E.

Jabatan : Sekretaris Pengadilan Negeri Pekalongan Kelas IB

Selanjutnya disebut ***Pihak Pertama***

Nama : SARWONO, S.H., M.Hum.

Jabatan : Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan Kelas IB

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut ***Pihak Kedua***

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak Kedua akan memberikan supervise yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pekalongan, Januari 2018

PIHAK KEDUA,

PIHAK PERTAMA

SARWONO, S.H., M.Hum.

NIP. 19581025 198201 1 002

PUJIONO, S.E.

NIP. 197106082006041001

REVISI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

UNIT KERJA : PENGADILAN NEGERI PEKALONGAN KELAS IB

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan : - Perdata - Pidana	100% 100%
		b. Persentase Perkara : - Perdata - Pidana yang diselesaikan tepat waktu	90% 90%
		c. Persentase Penurunan sisa perkara : - Perdata - Pidana	10% 10%
		d. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum : • Banding • Kasasi • PK	95% 97% 99%
		e. Persentase Perkara Pidana Anak Yang Diselesaikan dengan Diversi	2%
		f. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	80
		2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara
f. Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi	2%		
g. Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu.	80%		
h. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus	tidak ada perkara tipikor		
3	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	g. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	100%
		h. Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan	100%
		i. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100%
4.	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi)	1%

Kegiatan	Anggaran
1. Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	Rp. 5.870.593.000,-
2. Pengadaan Sarana dan Prasarana Di Lingkungan Mahkamah Agung RI	Rp. 381.250.000,-
3. Peningkatan Manajemen Peradilan	Rp. 71.340.000,-

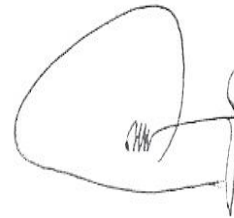
Pekalongan, Januari 2018

Ketua,



SARWONO, S.H., M.Hum.
NIP. 195810251982011002

Sekretaris,



PUJIONO, S.E.
NIP. 197106082006041001

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA



REVISI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel yang berorientasi kepada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : DWI RETNO WIDOWATI, S.H.

Jabatan : Panitera Pengadilan Negeri Pekalongan Kelas IB

Selanjutnya disebut ***Pihak Pertama***

Nama : SARWONO, S.H., M.Hum.

Jabatan : Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan Kelas IB

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut ***Pihak Kedua***

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pekalongan, Januari 2018

PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA,



SARWONO, S.H., M.Hum.
NIP. 195810251982011002

DWI RETNO WIDOWATI, S.H.
NIP. 195909261989032001

REVISI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

UNIT KERJA : PENGADILAN NEGERI PEKALONGAN KELAS IB

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan : - Perdata - Pidana	100% 100%
		b. Persentase Perkara : - Perdata - Pidana yang diselesaikan tepat waktu	90% 90%
		c. Persentase Penurunan sisa perkara : - Perdata - Pidana	10% 10%
		d. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum : • Banding • Kasasi • PK	95% 97% 99%
		e. Persentase Perkara Pidana Anak Yang Diselesaikan dengan Diversi	2%
		f. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	80
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	i. Persentase Isi Putusan yang diterima Oleh para pihak Tepat Waktu	100%
		j. Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi	2%
		k. Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu.	80%
		l. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus	tidak ada perkara tipikor
3	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	g. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	100%
		h. Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan	100%
		i. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100%
4.	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi)	1%

Kegiatan	Anggaran
1. Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	Rp. 5.870.593.000,-
2. Pengadaan Sarana dan Prasarana Di Lingkungan Mahkamah Agung RI	Rp. 381.250.000,-
3. Peningkatan Manajemen Peradilan	Rp. 71.340.000,-

Pekalongan, Januari 2018

PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA,



SARWONO, S.H., M.Hum.
NIP. 195810251982011002

DWI RETNO WIDOWATI, S
NIP. 195909261989032001

